

KONVOI DAN HAK

KEBIASAAN DISKRIMINATIF

WANITA muda yang berdiri di tepi jalan menggeleng-gelengkan kepala, sementara lelaki setengah baya yang berdiri di sebelahnya dengan raut muka yang tidak sedap dipandang mengumpat-umpat dengan ungkapan yang tidak jelas. Tidak jauh dari mereka seorang pedagang asongan hampir jatuh terserempet. Masih untung dia sempat menyorongkan badannya ke belakang, selamatlah dia, namun asongannya tumpah ruah bertebaran di jalan.

Sesaat setelah kejadian itu beberapa orang yang berada di sekitar tempat itu terlibat diskusi jalanan (sebab tidak ada pemrasaran, moderator dan penyanggah). Simaklah diskusi mereka. "Ada apa sih? Apa yang sedang terjadi? Apa hak mereka untuk menguasai jalan umum ini? Apakah sedemikian gawatnya kota Jakarta ini, sehingga mereka harus tergesa-gesa? "Yang lain menimpali sekenanya. "Itu kan biasa! Mereka raja jalanan! Unjuk rasa anarkis kali! Dasar tidak tahu diri! Ah mereka tidak berubah, tidak bedanya dengan zaman Orba! "Kejadian ini bukan skenario sinetron Indonesia yang idenya sering klise dan plagiat, namun suatu kejadian yang terjadi di suatu ruas jalan raya di ibu kota Jakarta.

Ketika kita akan bepergian dengan beberapa teman-teman atau keluarga dalam suatu ikatan rombongan kendaraan, dengan entengnya kita menyatakan kepada rombongan kita untuk melakukan konvoi saja. Tengok saja rombongan motor besar merek tertentu, klub pecinta mobil antik, rombongan pengantin, pengantar jenazah atau piknik keluarga ke suatu daerah wisata tertentu. Bahkan rombongan unjuk rasa pun berkonvoi menuju lokasi yang mereka inginkan. Termasuk rombongan ibu-ibu bhayangkari yang sedang melakukan kunjungan kerja. Pokoknya kita menjadi latah. Kita tidak ingin juga menyatakan bahwa konvoi tidak perlu, namun pertanyaannya siapa yang dibenarkan secara hukum untuk berkonvoi, bagaimana aturan pelaksanaannya dan bagaimana pihak-pihak yang berkonvoi menghargai/menghormati pengguna jasa jalan lainnya.

KONVOI (MOTORCADE) DAN DEMOCRATIC POLICING

Kata konvoi masuk dalam kosa kata bahasa Indonesia



sejak era kolonial Belanda dan hingga kini terus digunakan dalam pergaulan bahasa keseharian kita. Motorcade adalah salah satu kata dalam bahasa Inggris yang di dalam *21st century dictionary* edisi 1999 dapat diartikan "sebagai sebagai suatu rangkaian atau rombongan kendaraan pejabat-pejabat penting, khususnya tokoh-tokoh politik". Deskripsi tersebut jelas sekali bahwa prosedur konvoi diberlakukan kepada pihak-pihak tertentu, tidak dapat berlaku dan semauanya bagi mereka yang tidak masuk dalam katagori tersebut. Batasan dan prosedur ini terkesan ironis bila kita memproyeksikannya dalam keseharian kehidupan sosial kita. Masyarakat Indonesia sejak era reformasi berada dalam situasi transisional multi aspek, pemahaman atas makna demokrasi menjadi absurd dan subyektif.

ASASI MANUSIA

Oleh Boy Salamuddin



Kehidupan sosial yang demokratis, penegakan hukum dan HAM hanya komitmen formalitas belaka. Masyarakat dan bangsa Indonesia masuk dalam sumur tanpa dasar 'permisif'.

Bayley dalam bukunya "Changing the Guard" berpendapat bahwa terdapat empat hal prinsip yang krusial dalam suatu reformasi (keempat prinsip ini merupakan bagian dari delapan prinsip pemolisian demokratis), yaitu:

Pertama, polisi harus bertanggung jawab kepada hukum, bukan kepada pemerintah. Dalam konteks sistem demokrasi hal ini sangatlah benar, karena tindakan-tindakan pemerintah diatur atau dibatasi oleh undang-undang dan polisi adalah aparat hukum yang menegakan undang-undang nasional.

Kedua, Polisi bertugas melindungi HAM, terutama yang terkait dengan aktifitas-aktifitas politik dan hal ini merupakan ciri utama demokrasi.

Ketiga, bahwa polisi harus bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang memang diberikan otoritas atau mandat untuk mengawasi kinerja polisi. Di Indonesia kinerja Polri dimonitor, diawasi dan dikritisi oleh beberapa komisi DPR/DPRD, organisasi non pemerintah, media massa, akademisi, para purnawirawan Polri, termasuk komisi kepolisian itu sendiri.

Terakhir, polisi harus menetapkan prioritas operasionalnya untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan rasa aman masyarakat, hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Empat prinsip pokok tersebut bukanlah satu-satunya landasan teoritis yang dapat digunakan untuk menelaah fenomena sosial konvoi dan penegakan rule of law. Setidaknya kita berusaha bersikap jujur, terbuka, obyektif dan akuntebel terhadap hak dan kewajiban setiap manusia Indonesia.

PRIORITAS DAN KRITERIA

Tentu tidak semua orang atau rombongan dapat mengaku atau menyatakan mereka dapat prioritas. Harus jelas kepentingannya, siapa subyeknya dan bagaimana situasi yang sedang berlangsung yang dapat berpengaruh terhadap keamanan, keselamatan dan kelancaran subyek dan pengguna jasa jalan lainnya. Pasal 71 angka 2 huruf c Undang-undang nomor 14/1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang penggunaan jalan untuk kelancaran Kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara.

Secara lebih spesifik dan rinci di dalam Peraturan Pemerintah nomor 43/1993 paragraf 8 mengatur tentang Hak Utama Penggunaan Jalan Untuk Kelancaran Lalu Lintas, yang secara eksplisit mengatur pihak-pihak yang mendapatkan prioritas penggunaan jalan. Di sini disebutkan satu diantaranya adalah konvoi. Cuma yang menjadi pertanyaan kita adalah pihak atau kegiatan apa yang dapat dikategorikan atau diprioritaskan sebagai konvoi. Pertanyaan selanjutnya siapa yang

berwenang untuk menyatakan pihak-pihak tertentu sebagai konvoi, sebab berbagai praktek selama ini menunjukkan begitu mudahnya konvoi itu dilakukan. Ibaratnya anak seseorang tokoh tertentu yang berhajat resepsi perkawinan dapat mengatur mobilitas rombongan dalam bentuk konvoi.

Fenomena sosial yang terjadi adalah masyarakat tidak dapat membedakan mana konvoi resmi, mana kendaraan yang harus mendapatkan prioritas, sehingga orang sakit yang harus segera dirawat di rumah sakit harus menderita karena masyarakat tidak memberikan prioritas kepada mobil ambulance yang membawanya. Siapa yang dipersalahkan dalam hal ini? Biasanya masyarakat mudah sekali mengkambing-hitamkan polisi sebagai sumber masalah. Ironis sekali.

Diakui bahwa di masing-masing negara ada aturan hukum dan institusi yang berwenang menentukan siapa yang menjadi prioritas. Namun dari perasaan dan etika umum, maka tidak tepat kiranya suatu rangkaian terdiri dari puluhan kendaraan yang tidak terputus. Sebab bila ini terjadi, maka ada hak pengguna jasa jalan lainnya yang terabaikan.

Di kalangan masyarakat madani, tidak ada prioritas diberikan kepada gerak pindah sekelompok atau rombongan personil polisi. Bagi mereka semua berlaku hak dan kewajiban yang sama dimuka hukum. Inilah salah satu prinsip negara berlandaskan *rule of law*. konvoi rombongan polisi akan berhenti di lampu pengatur lalu lintas. Tidak terlihat laju kendaraan yang melebihi kecepatan yang diijinkan. Tambahan lagi teknik dan taktik mendahului kendaraan di depannya tidak arogan, mentang-mentang atau sembrono.

Bagi pengemudi kendaraan kecil tentu saja tidak mau

mengambil resiko tersambar atau tertabrak kendaraan-kendaraan yang berkonvoi. Tetapi kita tentunya tidak mau ada pihak yang dirugikan oleh kepentingan pihak lain yang sebenarnya tidak terlalu mendesak sekali.

Pertanyaannya apakah konvoi Polri atau TNI memang sangat mendesak untuk dilakukan, apalagi dalam frekuensi waktu yang relatif cukup sering. Padahal sebenarnya dari aspek utilitas, maka mungkin nilai kurang akan lebih dialamatkan kepada kedua aparat negara tersebut. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak menimbulkan sikap empatik dan simpatik dari masyarakat yang kita abdi, kita justru menuai antipati, celaan, cacian dan bahkan kebencian sosial dari masyarakat dimana kita berasal dan kepada mereka kita mengabdikan.

Kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, tidak juga kita harus tersinggung atau merasa tidak dihargai oleh mereka yang berdiskusi tadi. Yang perlu kita lakukan adalah menginterpretasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip *democratic policing* secara aktual, konsisten dan konsekuen kedalam kehidupan kita. Ini berarti kita harus saling memahami dan menghargai hak sosial orang lain, apapun yang kita lakukan harus berlandaskan *rule of law*, transparansi dan akuntabilitas publik. Karena kita sudah sepakat bahwa prinsip-prinsip itu sebagai bagian dari sistem dan mekanisme kontrol sosial masyarakat demokratis. Dengan demikian kita berharap tumbuh rasa saling ayom mengayomi. Kita tidak terlambat untuk memulainya, menjadi aparat negara/pemerintah yang dimiliki, dihargai dan didukung oleh masyarakat yang diayominya.





**DIREKTUR RESERSE DAN KRIMINAL
POLDA SUMATERA UTARA
BESERTA JAJARAN**

Mengucapkan Selamat Kepada:

AKBP Drs BANBRANG SUKAMTO

**ATAS JABATAN BARU MENJADI
KAPOLTABES MEDAN**

BHAKTI - DHARMA - WAFADA

Penyoja Sukses

**Komisaris Besar Polisi
Drs Ronny F Sompie**



AKBP Rudy Sumardiyanto SH

Pentingnya Sebuah Kemitraan

SAAT pertama menginjak tanah Tapanuli Selatan enam bulan lalu, Rudy Sumaryoto langsung berhadapan dengan kondisi mental anak buah yang tidak begitu baik. Atau dalam dunia psikologi, biasanya disebut dengan istilah traumatis. Meski tidak parah-parah amat namun toh diperlukan sebuah pendekatan yang cukup hati-hati.

Apa gerangan yang terjadi dengan mereka? "Ini berhubungan dengan sebuah operasi ganja yang gagal," ucap Rudy namun kemudian enggan menjelaskan kelanjutannya. "Sudah lah itu sudah lewat. Trauma itu sudah berlalu," tandasnya.

Menjadi Kapolres di wilayah dengan jumlah penduduk sebanyak 393.170 jiwa yang kebanyakan muslim tradisional yang taat beribadah merupakan berkah buat lulusan Akpol 1989 ini. "Minimal karena warganya taat beribadah, keinginan untuk berbuat kriminal juga kecil," jelasnya.

Meski demikian langkah sosialisasi juga terus dilakukannya dengan mendatangi pesantren, merangkul tokoh-tokoh agama seperti ustads. Di sela-sela ceramah agama yang mereka lakukan, Rudy "nitip" pesan penyuluhan seputar gangguan ketertiban dan keamanan.

Menurut Rudy, karena karakteristik masyarakatnya tradisional maka jenis kejahatan yang ada di wilayah seluas 6500 persegi itu pun bersifat tradisional. Judi menempati posisi atas, disusul pencurian dan pengrusakan kebun. Laporan kejadian yang masuk cukup banyak, namun kebanyakan berakhir dengan perdamaian dua pihak yang bermasalah, padahal kasusnya sudah diproses.

"Banyak cerita lucu seputar itu," ungkap Rudy yang mengaku selalu mencoba memahami karakter, kultur, bahkan mentalitas masyarakat setempat. Upaya itu dilakukannya demi memudahkan pekerjaannya sebagai orang nomor satu Polres Madina. "Kita harus masuk dan menyelami budaya mereka," terangnya.

Berkaitan dengan kelancaran tugasnya, Rudy tak ragu-ragu mengakui bahwa media, baik cetak maupun elektronik adalah mitra yang dirasakannya memiliki andil cukup besar. Namun dia menggarisbawahi bahwa kedekatannya bukan semata-mata menumpang atau mencari popularitas, melainkan demi kepentingan kerja.

Untuk itu dia juga tak segan-segan mengundang wartawan setiap kali ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak. Seperti penyuluhan keamanan, kampanye tertib berlalulintas, dan tentu saja kampanye bahaya narkoba.

Publikasi dan pemberita-

an yang dilakukan secara terus menerus, katanya, merupakan cara efektif dalam mendidik masyarakat Madina. Pengetahuan tentang ganja misalnya, masih banyak masyarakat Madina yang belum mengerti mengapa pemerintah melarang memperjualbelikan, menanam maupun memakainya. "Setelah baca koran dan nonton televisi barulah mengerti kenapa dilarang."

Di wilayahnya, rata-rata sebulan ada sembilan kasus narkoba. Dari angka pengungkapan, jelasnya, memang lebih kecil dibanding Polres-Polres lain di wilayah Poldasu. Tapi kalau diukur dari kualitasnya jauh lebih besar karena dalam satu kali penangkapan barang buktinya bisa berkilo-kilo. Barang terlarang tersebut umumnya dibawa ke kota oleh perempuan-perempuan desa yang menggendong anak. "Sekali antar mereka mendapat upah Rp 500 ribu," terang Rudy.

Rudy adalah kelahiran Palembang, 16 September 1965. Menikah dengan Dr Etty Trisnawati dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Dimas Aji Saputra (SD) dan Tara Audira (TK). Karena pernah mengikuti pendidikan Lantass Apel Doom di Belanda tahun 1996, Rudy pun bisa berbahasa Belanda, selain Bahasa Inggris.

Memahami bahasa rupanya bukan hal yang sulit bagi mantan Kasatlantass Poltabes Barelang Polda Riau, Wakapolres Simalungun Polda Sumut, Pamen Polda Sumut, Kasubbag Binlat Ro Ops Poldasu ini. Soalnya dia juga menguasai tiga bahasa daerah sekaligus, Jawa, Palembang dan Batak.

"Ini kan soal kemauan saja," ucap laki-laki yang mengaku tidak memiliki banyak keinginan dalam hidupnya, selain berharap ke depan bisa membawa komando dengan baik sesuai komitmennya pada institusi tempatnya mengabdikan sekarang. Untuk sampai pada posisinya sekarang, ungkapnya, berbagai perjuangan dilewatinya, di antaranya pernah menjadi orang pinggir dan bawahan.

Maka belajar dari pengalaman itu Rudy sangat mengerti bagaimana memperlakukan seorang bawahan. "Kesulitan yang dirasakan juga pernah saya rasakan," cetusnya. [cil]



Kompilasi **Andry Wibowo, Sik, MH,MSI.**

Tak Mau Pusing

S EJUMLAH kasus besar mewarnai catatan perjalanan karir Andry. Di antaranya pembunuhan pria model Naek Gonggom yang melibatkan pemain sinetron- dan juga model Lydia Pratiwi di kawasan lokasi hiburan Ancol. Kemudian sejumlah perampokan bank.

Saat itu, di tahun 2006, dia menjabat Kasatreskrim Polres Jakarta Utara. Setahun kemudian dipindah ke Polres Jakarta Barat dengan jabatan sama, Andri dan jajarannya memerangi premanisme yang berkembang subur di kawasan itu. Lebih dari seratus preman kena jerat hukum, termasuk pemimpin mereka, Hercules.

"Saya hanya ingin bekerja dengan baik. Bahwa itu sebuah prestasi, atasan sayalah yang menilai," ujar pria kelahiran 12 Juni 1971 ini.



Karena itu, Andri, yang menikahi Ati Wibowo dan dikaruniai tiga orang putra dan putri ini tak ingin banyak bicara seputar prestasinya. Dia juga tak pusing dimana dipindah tugaskan atau oleh siapa dia dipimpin. "Masing-masing orang pasti punya gaya tersendiri dalam memimpin. Dengan kekurangan dan kelebihan," ucapnya diplomatis.

Tapi tengok gayanya berpakaian. Pria lulusan Akpol 1993 ini termasuk golongan pria yang fashionable. Hari itu, mengenakan pantalon hitam sedikit menyempit ke bawah dipadu kemeja putih dengan motif garis vertikal, Andri terlalu rapih untuk disebut sebagai polisi yang sehari-hari bersentuhan dengan kekerasan. "Ah masa sih," tukasnya pendek.

Sepanjang karir polisinya, empat tahun dilaluinya di Polda NTT. Sempat tergabung dalam kontingen Garuda XV -12 di Bosnia, Kapolsek Metro Koja, Polres Metro Jakarta Utara, Juru Runding Pemerintah RI dan GAM di Aceh, Kanit IV/Sat IV/Wasendak DIT Intelkam dan Kanit II/VC Sat II/Um DIT Krimum Polda Metro Jaya. Dia juga pernah bergabung dengan Akpol Jepang untuk belajar apa yang sekarang populer dengan sebutan pemolisian masyarakat. [cil]

AKP Sarluman Siregar SH

Enggan Kembali Ke Jakarta

DUA puluh enam tahun berkarir di kepolisian, lebih banyak dilaluinya di bagian reserse dan kriminal. Terlama di Polres Tangerang 12 tahun, Polda Metrojaya 4 tahun, kemudian pindah ke Mabes Polri satu tahun, akhirnya ke Polda Sumatera Utara dan Polres Tapanuli Selatan hingga kini. Begitulah perjalanan karir Sarluman Siregar yang lulus dari sekolah kepolisian di Lido tahun 1982, kemudian meneruskan ke Secapa tahun 1998.

Lama bertugas di Tangerang, banyak pula kenangan yang melekat di ingatannya. Di kota industri itu dia banyak berhadapan dengan kasus perkosaan, perampokan dan pembunuhan yang melibatkan buruh, baik pelaku maupun korban. Dimana pemicunya kebanyakan juga sangat dekat dengan persoalan-persoalan buruh. Karena buruh juga sering diidentikkan dengan "orang kecil", maka erat pula kaitannya dengan urusan perut. "Sangat memprihatinkan," ucap kelahiran Padang Bola 9 September 1958 ini.

Kenangan akan teman dan atasan pun muncul dalam ingatannya ketika bicara soal Tangerang. Misalnya Kompol Iwan Bule, atasan yang katanya sangat care dengan anak buah. "Entah dimana beliau sekarang," ucapnya dengan mengemiyitkan dahi, berusaha mengingat-ningat.

Ingat Iwan Bule, ingat pula Siregar akan jasanya. Tanpa dorongan atasannya itu mungkin dia tidak memperoleh kehidupannya seperti sekarang, tenang dan nyaman. Semua berawal dari perintah mutasi ke Polda Sumut untuk dirinya. Terbayang olehnya Medan yang sepi, sementara anak-anaknya pun sudah terbiasa hidup di kota yang ramai. Namun atasannya memberinya dorongan semangat sehingga dengan mantap dijalani perintah itu.

Tepat dugaannya, bulan-bulan pertama ketiga anaknya tidak betah

dan sehari-hari sepulang sekolah hanya mengurung diri di kamar. Untungnya keadaan itu hanya berlangsung tiga bulan karena setelah itu semuanya bisa beradaptasi. "Rasanya mau nangis melihat kemurungan anak-anak waktu itu," kenang Kasatreskrim Polres Tapanuli Selatan ini.

Tapi itu masa lalu. Sekarang, Siregar sudah hidup menyatu dengan kehidupan di daerah bersama isteri dan putra-puteri yang sudah dewasa. Tak lagi terbersit sedikit pun di benaknya untuk kembali ke Jakarta. "Macetnya tidak tahan. Mimpi pun enggan kembali ke Jakarta," cetus suami dari Rini dan ayah dari Ricky, Rinny dan Iswin ini. [cil]

